



P E M E R I N T A H  
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R



BAPPEDA  
KALTIM

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Tahun 2019 - 2023**



Samarinda  
2019





# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambah Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

**Pasal 2**

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I.       Pendahuluan;**
- BAB II.       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;**
- BAB III.      Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;**
- BAB IV.      Tujuan dan Sasaran;**
- BAB V.       Strategi dan Arah Kebijakan;**

- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII. Penutup.

### Pasal 3

Rincian lebih lanjut Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- v. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- w. Dinas Pariwisata;
- x. Dinas Perkebunan;
- y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- z. Dinas Kehutanan;
- aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- bb. Sekretariat Daerah;
- cc. Sekretariat DPRD;
- dd. Badan Penghubung Provinsi;
- ee. Inspektorat;
- ff. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ii. Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur;
- kk. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ll. Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, telah sesuai dengan:

- a. Sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 6

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD); dan
- b. Bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda - 75123

☎ (0541) 741044 – Sentral

☎ 743085 – Kepala

☎ 745381 – Bid. Ekonomi

☎ 745351 – Bid. Perencanaan & Pengendalian

☎ (0541) 742283 – Faksimili

☎ 743086 – R. Rapat Kepala

☎ 745382 – Bid. Pemerintahan & Sosial Budaya

Pembangunan Daerah

☎ 736212 – Sekretaris

☎ 737551 – Bid. Prasarana Wilayah

☎ 745380 – UPTB. Pusat Data & Informasi

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 188.4/ 543 /B.PRK-Bapp/2019

### TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Rencana Strategis Bappeda Prov.Kaltim sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja Bappeda Prov.Kaltim dalam mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
- c. bahwa sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Npmor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)

7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78),
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70)

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9),
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana DIKTUM KESATU merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 29 April 2019

**Kepala,**



---

**DR. Ir. H. ZAIRIN ZAIN, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590714 198611 1 001



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Hidayahnya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah disusun dengan baik.

Dokumen Renstra disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan. Sehingga Renstra merupakan perencanaan yang akan menjadi dasar kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin.

Dokumen Renstra akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim. Dengan demikian, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran disampaikan terimakasih.

Samarinda, 29 April 2019

**KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si**  
NIP. 19590714 198611 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi .....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	

### BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4

### BAB II. GAMBAR PELAYANAN BAPPEDA PROV.KALTIM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Prov.Kaltim .....	II-1
2.1.1. Tugas Pokok BAPPEDA Prov.Kaltim .....	II-1
2.1.2. Fungsi BAPPEDA Prov.Kaltim.....	II-1
2.1.3. Struktur Organisasi BAPPEDA Prov.Kaltim.....	II-2
2.1.4. Uraian Tugas .....	II-3
2.2. Sumber Daya BAPPEDA Prov.Kaltim .....	II-8
2.2.1. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Prov.Kaltim.....	II-8
2.2.2. Aset dan Modal.....	II-10
2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional.....	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Prov.Kaltim.....	II-15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA Prov. Kaltim .....	II-45

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROV.KALTIM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Prov. Kaltim.....	III-1
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	



Daerah Terpilih.....	III-4
3.3. Penelaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim.....	III-13
3.4. Penelaahan RT-RW Provinsi Kalimantan Timur.....	III-14
3.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.....	III-14
3.4.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang.....	III-17
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Prov. Kaltim.....	III-18

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Prov.Kaltim.....	IV-1
--	------

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... V-1**

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Prov.Kaltim .....	V-1
--	-----

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. Rencana Program .....	VI-1
6.2. Rencana Kegiatan.....	VI-6
6.3. Indikator Pencapaian Tujuan.....	VI-8
6.4. Pendanaan Indikatif.....	VI-9

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Prov.Kaltim Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin Tahun 2018 .....	II-8
<b>Tabel 2.2.</b> Aset dan Modal .....	II-10
<b>Tabel 2.3.</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Prov. Kaltim .....	II-17
<b>Tabel 2.4.</b> Anggaran dan Realisasi dan Capaian Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim .....	II-45
<b>Table 3.1.</b> Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	III-3
<b>Table 3.2.</b> Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur .....	III-5
<b>Table 3.3.</b> Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....	III-5
<b>Tabel 4.1</b> Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim .....	IV-4
<b>Table 5.1.</b> Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	V-2
<b>Tabel 6.1.</b> Rencana Program dan Kegiatan Strategi .....	VI-2
<b>Tabel 6.2.</b> Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif (dalam juta) .....	VI-11
<b>Tabel 7.1.</b> Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-1



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> Struktur Organisasi .....	II-3
<b>Gambar 2.2.</b> Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim.....	II-9
<b>Gambar 2.3.</b> Grafik Golongan ASN pada Bappeda Prov. Kaltim .....	II-9
<b>Gambar 2.4.</b> Grafik Tingkat Pendidikan ASN Bappeda Prov. Kaltim.....	II-10
<b>Gambar 2.5.</b> Grafik Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS Bappeda Prov. Kaltim .....	II-10

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang dan fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan sebagai penentu tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi penting terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selain melaksanakan tugas juga harus melaksanakan fungsinya sebagai; Perumus Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksana Administrasi Kedinasan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim sebagai Perangkat Daerah selain menjalankan fungsi juga melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian selaku Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Prov. Kaltim berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan perencanaan Bappeda Prov. Kaltim selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel serta berkualitas.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaga- Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2023.
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
  11. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/5678/B.P3D-Bapp/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 26 November 2018.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh Aparatur Sipil Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 digunakan pula sebagai dasar Rencana Kerja tahunan (Renja) dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan utama penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mengoptimalkan peran perencana pembangunan sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun secara sistematis sebagai berikut :

- BAB I**        **Pendahuluan,** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II**       **Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur,** menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.



- BAB III** **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta isu-isu strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB IV** **Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- BAB V** **Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI** **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII** **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
- Bab VIII** **Penutup,** Berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.



**BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta tata kerja Bappeda Prov. Kaltim adalah sebagai berikut :

**2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Prov. Kaltim**

- 1) Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- 2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**2.1.2. Fungsi Bappeda Prov. Kaltim**

- 1) Penyusunan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan
- 2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
- 3) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 6) Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya



### **2.1.3. Struktur Organisasi Bappeda Prov. Kaltim (sesuai dengan Susunan Organisasi**

#### **Tata Kerja)**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

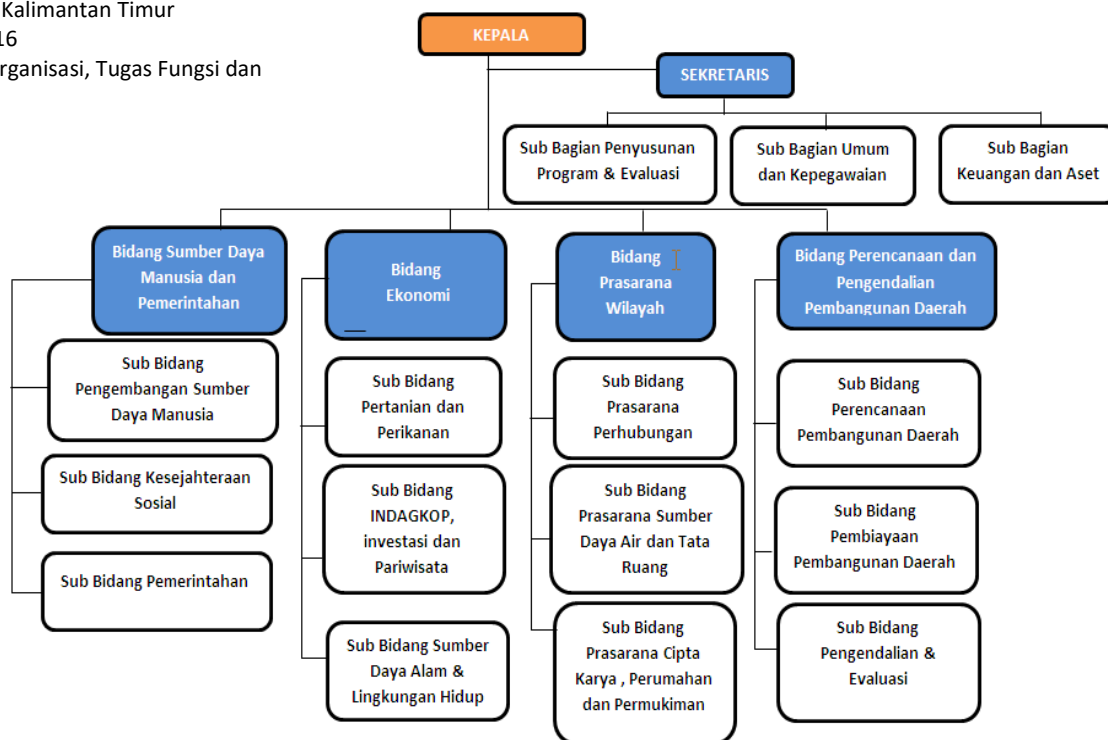
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan yang terdiri dari :
  1. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
  1. Subbidang Pertanian dan Perikanan
  2. Subbidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
  3. Subbidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan terdiri dari:
  1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
  2. Subbidang Kesejahteraan Sosial
  3. Subbidang Pemerintahan
- e. Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari:
  1. Subbidang Prasarana Perhubungan
  2. Subbidang Prasarana Sumberdaya Air dan Tata Ruang
  3. Subbidang Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
- f. Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi terdiri dari:
  1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah
  3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi



Gambar 2.1

Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur  
Nomor 76 Tahun 2016  
Tentang : Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan  
Tata Kerja Bappeda



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut;

A. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan, Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan Tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan kewenangan yaitu :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;



- b. Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia dan pemerintahan;
- f. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana wilayah

**B. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing masing dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan, serta pengaduan masyarakat;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.



**C. Bidang Ekonomi**

- 1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kepala Bidang Ekonomi membawahi 3 (tiga) Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembangunan Bidang Ekonomi
  - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pembangunan di bidang Ekonomi;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pertanian dan perikanan
  - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
  - e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**D. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan**

- 1) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sumberdaya manusia dan pemerintahan. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang



dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang sumber daya manusia dan pemerintahan
  - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang sumberdaya manusia dan pemerintahan
  - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pengembangan sumber daya manusia
  - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang kesejahteraan sosial
  - e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pemerintahan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

#### **E. Bidang Prasarana Wilayah**

- 1) Bidang Prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis di bidang prasarana wilayah. Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Prasarana Wilayah membawahi subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Prasarana Wilayah menjalankan fungsi sebagai berikut:



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang prasarana wilayah
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang prasarana wilayah
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Prasarana Perhubungan
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

**F. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis di bidang pembangunan daerah. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
  - b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah



- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang perencanaan pembangunan daerah
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pembiayaan pembangunan daerah
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya

## 2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Bappeda Prov. Kaltim

Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil sebanyak 182 orang secara keseluruhan yang terdiri dari 108 jumlah orang PNS dan 74 Jumlah tenaga *outsourcing*.

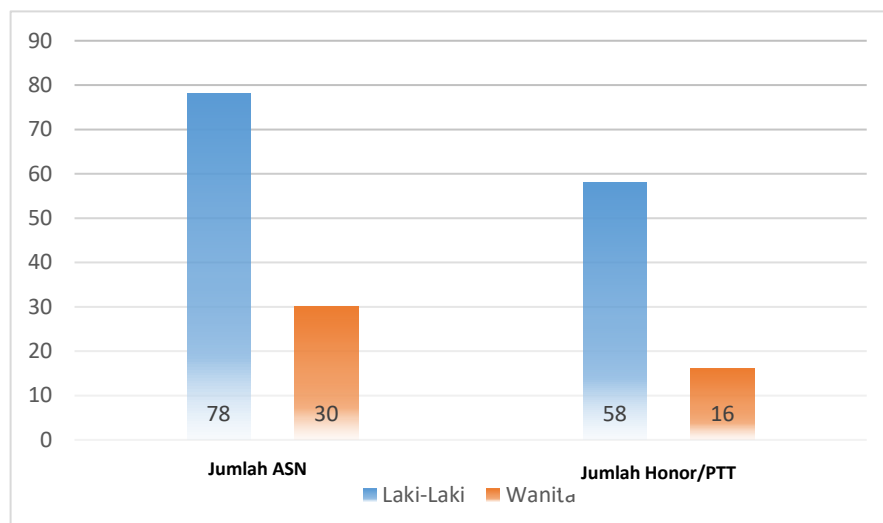
**Tabel 2.1**  
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan  
Esselon dan Jenis Kelamin tahun 2019

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Doktor	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan	1		1				1						
Sekretaris	1		1					1					
Ka. Bidang	3	1	4					2	2				
Ka.Subbag	3			3				1	2				
Ka.Subbid	7	5	6	3				5	7				
Kasi	2		2						2				
Staf	61	24		50	34	4		13	27	3	39	1	2
<b>Jumlah PNS</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Jumlah Honor/PTT</b>	<b>58</b>	<b>16</b>						<b>3</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>Jumlah PNS + Honor/PTT</b>	<b>136</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>112</b>	<b>68</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan peraturan daerah adalah : 1 (satu) orang Esselon II; 5 (lima) orang Esselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, Serta 17 orang esselon IV dan 84 orang non esselon.

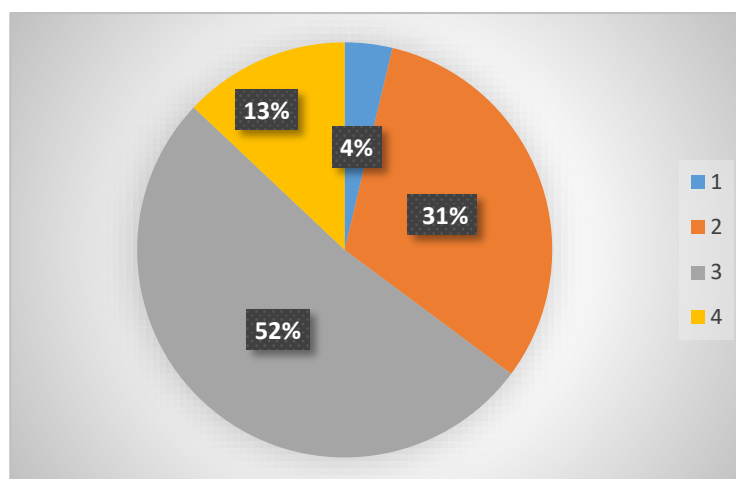


**Gambar 2.2.** Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim



Pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Honorer/PTT. Berdasar pada jenis kelamin ASN Pria berjumlah 78 orang dan ASN Wanita berjumlah 30 orang. ASN tersebar rata pada bidang bidang perencanaan dan Sekretariat. Selain ASN terdapat pula Tenaga Honor/PTT yang berfungsi membantu ASN dalam melaksanakan tugas tanpa lepas tangan dari ASN.

**Gambar 2.3.** Grafik Golongan ASN pada Bappeda Prov. Kaltim

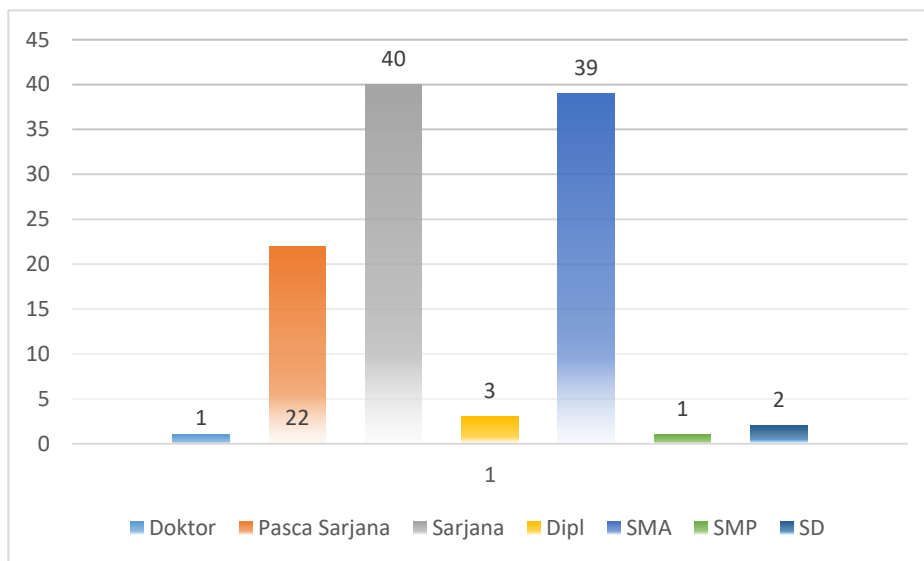


ASN yang bekerja di Perangkat Daerah Bappeda Prov. Kaltim seperti pada gambar 2.2 dilakukan penggolongan dan pengelompokan dilakukan sesuai

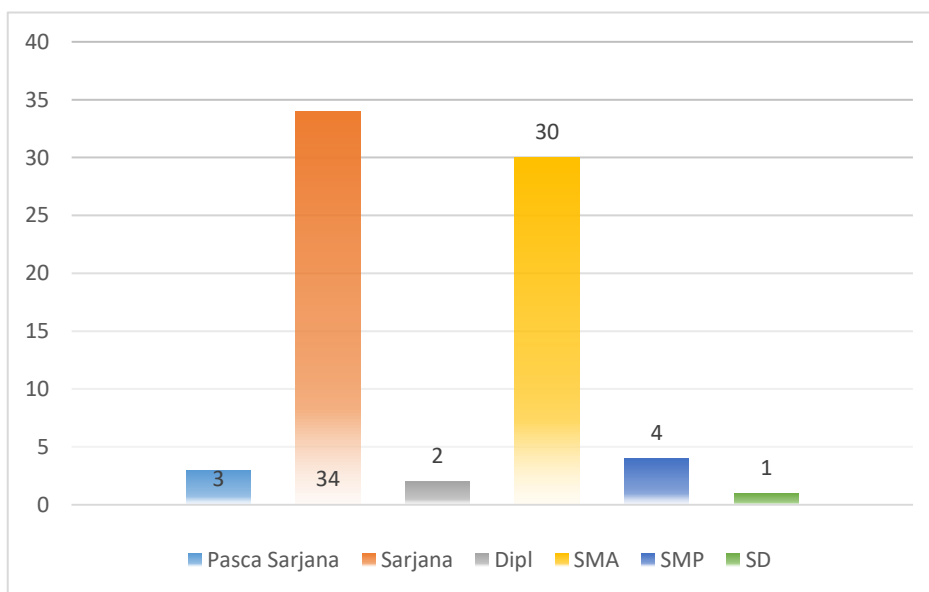


dengan jabatan yang diemban dapat pula berbanding lurus dengan masa kerja yang telah ditempuh selama menjadi ASN. Pada Bappeda Prov. Kaltim Golongan IV berjumlah 14 orang yang terdiri dari Eselon II, III dan IV dan Non Eselon 1 orang.

**Gambar 2.4.** Grafik Tingkat Pendidikan ASN Bappeda Prov. Kaltim



**Gambar 2.5.** Grafik Tingkat Pendidikan Tenaga Non PNS Bappeda Prov. Kaltim





2.2.3. Aset dan modal

Tabel 2.2  
Aset dan Modal

No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
1	Komputer	13
2	AC	55
3	Printer	40
4	Kursi Kayu / Busa	13
5	Kursi Kerja	20
6	Mesin Fotocopy	4
7	Lemari Arsip	28
8	Mesin Penghancur Kertas	5
9	Meja Resepsionis	14
10	Kursi Tamu	12
11	Meja Tamu	9
12	Meja Kecil Samping	10
13	TV	10
14	Telephone Pabx	9
15	Meja Kerja	33
16	Sekat Partisi Staf	24
17	Sekat Partisi Esselon IV	2
18	Jam Dinding	7
19	Lemari	25
20	Meja Bundar	3
21	Kursi Putar	30
22	Kulkas Mini	1
23	Server CCTV	2
24	Brankas	5
25	Meja Rapat	133
26	Dispenser	7
27	Mesin Ketik	4
28	Kursi Rapat	518
29	Lampu Dinding	6
30	Meja Satpam	1
31	Mini PC	1
32	Lemari Es	3
33	Kursi Menghadap	4
34	Meja Arsip	2

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM  
TAHUN 2019-2023**



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
35	White Board	5
36	Laptop	1
37	Telephon	1
38	Filling Kabinet 2 Laci	10
39	Filling Kabinet	3
40	PC Server	1
41	UPS	3
42	Filling Kabinet 3 Laci	1
43	Mesin Penghitung Uang Portable	2
44	Note Book	1
45	Filling Kabinet 3 Laci	4
46	Filling Kabinet 4 Laci	2
47	Meja	1
48	Kursi Besi	219
49	Kipas Angin	6
50	Kursi Rapat Kayu	9
51	Foto Gubernur	1
52	Foto Wakil Gubernur	1
53	Rak Buku	3
54	Peta Wilayah	11
55	Jam Mekanis	1
56	Lambang Garuda Pancasila	1
57	Meja Samping/Tambahan	1
58	Tempat Sampah	1
59	Meja Rak	2
60	Speaker	11
61	Microphone Kabel & Wireless	84
62	Monitor CCTV	2
63	Meja Panjang Khusus TV	1
64	Sofa	4
65	Rak Buku	1

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM  
TAHUN 2019-2023**

---



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
66	Kursi Hadap	2
67	Meja Keamanan	1
68	Kursi	1
69	Meja Pimpinan Rapat	2
70	Meja Podium	1
71	Meja Tambahan	4
72	Meja Tambahan Rapat	2
73	Foto Presiden	1
74	Foto Wakil Presiden	1
75	Meja Proyektor	2
76	Loa Speaker	8
77	Kursi Pimpinan	22
78	Screen Proyektor	10
79	Pengharum Ruangan	3
80	Papan Backdrop Spanduk	1
81	Tiang Bendera	2
82	Power Amplifier	1
83	Mixing Console	1
84	Power Amplifier	1
85	DVD Player Portable	1
86	Meja Saji	4
87	Meja Lipat	4
88	Meja Tambahan	5
89	Screen Proyektoe	1
90	Foto Kepala - Kepala Bappeda Prov.Kaltim	9
91	LCD	7
92	Meja Panjang	3
93	Web Smart Switch Hub	1
94	AC	1
95	Power Amplifier	1
96	Server Pabx	1
97	Meja Segi Empat	1

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM  
TAHUN 2019-2023**

---



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
98	Sound System	1
99	Meja Podium	1
100	Meja Tambahan Kecil	1
101	Kursi Rapat Coklat	109
102	Layar Slide	2
103	Meja Makan	1
104	Lemari Kayu Sound System	1
105	Wireless Proyektor	1
106	Power Amplifier	1
107	Mixer	1
108	Kursi Rapat Biasa	63
109	Kursi Rapat Pimpinan	3
110	Mic Bosch	15
111	Meja Lipat	2
112	Amplifier	1
113	Switch Hub	1
114	Lemari Panel Automatic Swith Genset	1
115	Kapasitor Bank (Stationary Generating Set)	1
116	Mesin Genset Komatsu	1
117	Rak Besi	1
118	Meja	1
119	Kursi Panjang	2
120	Lampu Gantung	1
121	Load Speaker Kecil	2
122	Mesin Penghisap Debu	1
123	Speaker Luar	2
124	Amplifier	1
125	Meja Makan	4
126	Lampu Gantung	1
127	Amplify Player	1
128	Salon Carter	1



No	Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)
129	Kursi Makan	50
130	Meja Makan bundar	10
131	PC Karaoke	1
132	Monitor	1
133	Microphone	6
134	Router / Microbyte	1
135	Cisco Switch Atas	1
136	Cisco Switch Bawah	1
137	Mikrobyte	1
138	IBM System X3650 M3	1
139	Dell Power Edge R420	1
140	Semi Jeep	5
141	Mini Bus	9
142	Mopen	3
143	Sepeda Motor	28
<b>Jumlah</b>		<b>1.896</b>

#### 2.2.4. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Unit usaha yang beroperasi di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur diantaranya Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kesuma Bangsa yang menjual sembilan bahan pokok, simpan pinjam dan sandang. Kantin Bappeda Prov. Kaltim yang menjual makanan siap saji untuk sarapan, makan siang dan menyediakan makan untuk kegiatan.



### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Prov. Kaltim**

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. RPJMD 2019-2023
2. RENSTRA 2019-2023
3. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim
4. Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018
5. Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK
6. Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
7. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA LH
8. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
9. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata
10. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial
12. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan
13. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan
14. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang
15. koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
16. koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
17. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman
18. Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau



19. laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
20. Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPPRA dan LKPJ
21. Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota
22. Dokumen Evaluasi RKPD
23. Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
24. Laporan penanggulangan kemiskinan
25. RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
26. laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)
27. laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)
28. Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment
29. System SIPPD
30. Sistem Informasi Data (SIDATA) Bappeda Prov. Kaltim
31. *e-Lybrary* Bappeda Prov. Kaltim
32. System One Data One Map

Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Bappeda memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/Biro Setda Prov. Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Gambaran kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur periode lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.



**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi				Capaian						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Terlayannya administrasinya perkantoran	(3)	3.814,27	(5)	0,00	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		100 %			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	5000 lembar	15.00		0,00	5000 lembar	5000 lembar	5000 lembar			5000 lembar	5000 lembar	5000 lembar			100%	100%	100%		
3	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan komunikasi, internet, air bersih, dan listrik (4 Jasa)	12 Bulan	713.00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
4	Jumlah Bulan Terlayannya Perijinan Surat Kendaraan R4 dan R2 yang diadministrasikan (20 R4 dan 30 R2)	12 Bulan	36.00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
5	Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor dan taman	12 Bulan	677.70		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
6	Jumlah Bulan Jasa perbaikan peralatan kerja (8 Jenis)	12 Bulan	133.57		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
7	Jumlah Bulan Penyediaan ATK untuk kesekretariat	12 Bulan	125.00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
8	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggantian	12 Bulan	50.00		0,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			100%	100%	100%		
9	Jumlah Bulan Penyediaan lampu dan alat kelistrikan	12 bulan	60.00		0,00	12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan			100%	100%	100%		



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian						
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018				
		Target	(3)	Target	(4)	Target	(5)	Target	(6)	Target	(7)	Target	(8)	Target	(9)	Target	(10)	Target	(11)	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
10	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (BBM, Pelumas, Tabung Pemadatan)	12 Bulan	94.80	12 Bulan	0.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah bahan bacaan dan peraturan	600 eksemplar	65.00	600 eksemplar	0.00	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	600 eksemplar	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)	12 Bulan	205.00	12 Bulan	0.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 kegiatan	1,000.00	30 kegiatan	0.00	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	14 kegiatan	500.00	14 kegiatan	0.00	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	12 Bulan	139.20	12 Bulan	0.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
16	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	3,362.68	100 %	0.00	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah kendaraan dinas		0.00		0.00																			
18	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 jenis	899.17	3 jenis	0.00	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah peralatan gedung kantor	6 jenis	1,079.46	6 jenis	0.00	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	100%	100%	100%	100%





Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian							
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	K	Tahun 2015	K	Tahun 2016	K	Tahun 2017	K	Tahun 2018	K	
31	Pakaian khusus beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Stel	59.73	120 Stel	0.00	135 Stel	135 Stel	135 Stel	360 Stel	360 Stel															
32	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80 %	534.60	100%	0.00	100%	90 %	100%	100%	100%															
33	Dokumen CALK	1 Laporan	534.60	1 Laporan	0.00	1 Laporan																			
34	Dokumen LAKIP, RKT, PK		0.00	3 Dokumen	0.00	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen															
35	Dokumen LPPD		0.00	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen															
36	Dokumen SOP Perencanaan (Bid.P3d.Bid.Stadial,Sekretariat,Bid.Perencanaan)		0.00	2 Dokumen	0.00	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen															
37	Terlayannya administrasi perkantoran		0.00	100%	6,000.00	100%	100%	100%	100%	100%															
38	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		0.00	12 Bulan	6,000.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan															
39	Terpenuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur		0.00	100%	2,600.00	100%	100%	100%	100%	100%															
40	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		0.00	12 Bulan	2,600.00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan															
41	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		0.00	95%	3,160.00	90%	90%	90%	90%	90%															

# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Realisasi					Capaian				
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		Target		Target		Target	Target	Target	Target	Target	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
41	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
42	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman		0,00	12 Bulan	1,660.00				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	50%
43	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek		0,00	10 Orang	1,500.00				10 Orang	10 Orang				12orang	10orang				100%	100%
44	Jumlah Pakaian Olah Raga			120 Stel					136 Stel	180 Stel				167 stel	180 Stel				100%	100%
45	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		0,00	80%	500.00				80%	80%				100%	125%				125%	
46	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran		0,00	10 Dokumen	350.00				10 Dokumen	10 Dokumen				10	10 Dokumen				100%	100%
47	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			4 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%
48	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		0,00	4 Dokumen	150.00				4 Dokumen	4 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen				100%	100%
49	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	82 %	7,801.84	86 %	0,00														100%	
50	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	16 Dokumen	3,180.99	14 Dokumen	0,00														100%	
51	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan (KDA, Bulletin, PDRB, dll)	80 %		82 %	0,00														100%	
52	Penyusunan Dokumen KUA-PPAS, APBD, P-APBD tepat waktu	1 tepat waktu	3,627.80	1 tepat waktu	0,00														100%	





Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Realisasi					Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
62	Jumlah Kab/Kota yang berperan serta dalam perencanaan persiapan implementasi pembangunan air minum, drainase dan sanitasi	6 kab/kota	550,00		0,00	1 kab/kota				1 kab/kota					100%					
63	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan dokumen perencanaan	60 %	472,80		0,00	70 %	80 %			70 %	70 %	87 %			100%	100%	109,16%			
64	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	50 orang	397,80		0,00	50 orang	50 orang			50 orang	50 orang	12 orang			100%	100%	24%			
65	Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	75,00		0,00	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100%	100%	100%			
66	Dokumen Renja dan Perubahan Renja		0,00		0,00		2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%			
67	Dokumen Renstra BAPPEDA/ Revisi Renstra BAPPEDA		0,00		0,00	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen									
68	Dokumen RKA/DPA Murni dan Perubahan		0,00		0,00		4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen					100%			
69	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	0 tahapan	0,00		0,00	0 tahapan	0 tahapan	6 tahapan			6 tahapan	6 tahapan					100%			
70	Penyediaan berita dan informasi pembangunan pada web bappeda dan media lain	0 bulan	0,00		0,00	0 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan					100%			
71	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73,06 %	10,916,25		0,00	77,23 %				77,23 %					100%					
72	Jumlah peserta yang menghadiri		0,00		0,00	600	600			600	600				100%					





Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Target	Tahun 2015	Target	Tahun 2016	Target	Tahun 2017	Target	Tahun 2018	Tahun 2014	K	Tahun 2015	K	Tahun 2016	K	Tahun 2017	K	Tahun 2018	K
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
85	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Perencanaan (KDA, Bulletin, PDRB, dll)	80 %	0,00		0,00	82 %																		
86	Penyusunan Dokumen KUA-PPAS, APBD, P-APBD tepat waktu	1 tepat waktu	3,627,80		0,00	1 tepat waktu																		
87	Pengelolaan website	1 Web	993,05		0,00	1 Web																		
88	Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan	60 %	3,098,80		0,00	65 %	70 %	70 %							65 %									
89	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	1 Dokumen	3,098,80		0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							1									
90	Jumlah Kunjungan Kerja ke Pemerintah Pusat				0,00		10 kunjungan	10 kunjungan																
91	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan	67 %	5,674,09		0,00	70 %																		100%
92	Laporan koordinasi rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Laporan	3,173,48		0,00	1 Laporan									1 Laporan									100%
93	Dokumen perencanaan kawasan industri pelabuhan internasional	1 Dokumen	2,500,61		0,00	1 Dokumen									1 Laporan									100%
94	Presentase perencanaan pengembangan kab/kota	35 %	750,00		0,00	35 %																		
95	Jumlah kab/kota yang berperan serta dalam perencanaan penangan perumahan	1 kab/kota	200,00		0,00	1 kab/kota									1 kab/kota									100%



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian									
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018							
		Target	(4)	Target	(5)	Target	(6)	Target	(7)	Target	(8)	Target	(9)	Target	(10)	Target	(11)	Tahun	K	Tahun	K	Tahun	K	Tahun	K	Tahun	K
96	Jumlah Kab/Kota yang berperan serta dalam perencanaan persiapan implementasi pembangunan air minum,	6 kab/kota	550.00	0.00	0.00	6 kab/kota	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
97	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	65 %	2.321.42	0.00	0.00	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %
98	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor pembangunan dunia	6 Laporan	2,321.42	0.00	0.00	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan
99	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan	60 %	1,978.30	0.00	0.00	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
100	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1,428.30	0.00	0.00	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
101	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pendidikan	1 Laporan	550.00	0.00	0.00	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
102	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	4 Dokumen	4,562.00	0.00	0.00	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
103	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2 Dokumen	2,650.50	0.00	0.00	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
104	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Sektor Pengembangan prasarana wilayah	1 Dokumen	444.00	0.00	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian													
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018											
		Target	(3)	Target	(4)	Target	(5)	Target	(6)	Target	(7)	Target	(8)	Target	(9)	Target	(10)	Target	(11)	Tahun 2014	K	Tahun 2015	K	Tahun 2016	K	Tahun 2017	K	Tahun 2018	K		
105	Dokumen perencanaan prasarana wilayah	1 Dokumen	1,567.50	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
106	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur	62 %	2,088.90	66 %	0,00	66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %		66 %	
107	Laporan koordinasi perencanaan, Laporan hasil verifikasi Renja dan Renstra SKPD dan Dokumen Rencana Pembangunan	2 Dokumen	1,596.50	2	0,00	2	Dokumen	2	0,00	2	Dokumen	2	0,00	2	Dokumen	2	0,00	2	0,00	2	Dokumen	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00
108	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Dokumen	492.40	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	0,00	1	Dokumen	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
109	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian				3,299.14	70 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %	
110	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor PDU-EK		0,00		0,00	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan	
111	Laporan Penganggaran Provinsi					10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan		10 Laporan	
112	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor PDU-EK					4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	
113	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor PDU-EK					4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
		Target		Target		Target	Target	Target	Target	Target	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K			
114	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor PDU-EK	(3)	0.00	(4)	0.00	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%					
115	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor SDA-LH		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan	5 Laporan				100%	100%					
116	Laporan Penganggaran Provinsi						10 Laporan	10 Laporan				10 Laporan	10 Laporan				100%	100%					
117	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor SDA-LH						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%					
118	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor SDA-LH						4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan				100%	100%					
119	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor SDA-LH		0.00		0.00		1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%					
120	Dokumen perencanaan kawasan industri berbasis pangan		0.00		0.00		2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%					
121	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		0		0.95				90%	95%				100%					111.11%				
122	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH		0.00		0.00		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan					100%				
123	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid SDA LH				5 Laporan				5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan					100%				



# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Realisasi					Capaian				
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		Target		Target		Target	Target	Target	Target	Target	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
133	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
										4 Laporan					4 Laporan					
134	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata									1 laporan					1 laporan					
135	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan		0.00		0.00		75 %	77 %									148.33%	129.87%		
136	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Prasarana Wilayah		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan										100%		
137	Laporan Penganggaran Provinsi						10 Laporan	10 Laporan										100%		
138	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Rerja SKPD sektor Prasarana Wilayah						4 Laporan	4 Laporan										100%		
139	Laporan Triwulan Komplisi Data Pembangunan sektor Prasarana Wilayah						4 Laporan	4 Laporan										100%		
140	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Prasarana Wilayah			0.00			1 Dokumen	1 Dokumen										100%		
141	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Pengembangan Wilayah		0.00		0.00		5 Laporan	5 Laporan										100%		



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi				Capaian						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
142	Laporan Penganggaran Provinsi					10 Laporan	10 Laporan				10 Laporan	10 Laporan					100%			
143	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pengembangan Wilayah					4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan					100%			
144	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pengembangan Wilayah					4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	4 Laporan					100%			
145	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah				0.00	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen					100%			
146	Roadmap Air Minum Provinsi Kalimantan Timur				0.00	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen					100%			
147	Kertas Kerja BKPRD Provinsi Kalimantan Timur				0.00	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen					100%			
148	Dokumen perencanaan kawasan industri pelabuhan internasional		0.00			1 Dokumen	0				1 Dokumen	0								
149	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	0	0.00			0	600 data				0	600 data					100%			
150	Terselenggaranya Forum One Data One Map					2 Forum	2 Forum				2 Forum	2 Forum					100%			
151	Terselenggaranya Rakor One Data One Map					2 Rakor	2 Rakor				2 Rakor	2 Rakor					100%			
152	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur		0.00			70%	80%				100%	100%					142.86%	125%		

# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
		Target		Target		Target	Target	Target	Target	Target	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
153	Laporan Akhir Tahun Kegiatan, Laporan Kegiatan Penilaian RKPD Kab/Kota (Pangripta), Laporan Hasil Survey IPK, Laporan Hasil					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				100%	100%					
154	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Pemerintahan					5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan				100%	100%					
155	Laporan Penganggaran Provinsi sektor Pemerintahan					10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan				100%	100%					
156	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pemerintahan					4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	4 laporan				100%	100%					
157	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pemerintahan					4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	4 laporan				100%	100%					
158	Dokumen perencanaan pembangunan sektor Aparatur					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				100%	100%					
159	Laporan Perencanaan Prog/Keg SKPD dan Kab/Kota sektor Aparatur					5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan				100%	100%					
160	Laporan Penganggaran Provinsi sektor Aparatur					10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan				100%	100%					
161	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Aparatur					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				100%	100%					
162	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Aparatur					4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan				100%	100%					

# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi				Capaian											
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018					
						(3)	(4)	(5)	(6)	Target	Target	Target	Target	Target	K	K	K	K	K	K	K	K	K		
163	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		0.00		0.00		63.00%	(8)	(9)	(10)	(11)		100%	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	159%	(19)	148%	(20)	(21)
164	Laporan Perencanaan Prog/keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Kesejahteraan Rakyat		0.00		0.00	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan				5 Laporan		5 Laporan						100%				
165	Laporan Penganggaran Provinsi					10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan				10 Laporan		10 Laporan						100%				
166	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Kesejahteraan Rakyat					4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan				4 Laporan		4 Laporan						100%				
167	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat					4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan				4 Laporan		4 Laporan						100%				
168	Dokumen Rencana Pembangunan Sektor Kesejahteraan Rakyat				0.00	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen						100%				
169	Laporan Perencanaan Prog/keg SKPD dan Kab/Kota Sektor Pendidikan, Mental dan		0.00		0.00	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan				5 Laporan		5 Laporan						100%				
170	Laporan Penganggaran Provinsi					10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan				10 Laporan		10 Laporan						100%				
171	Laporan Triwulan Evaluasi dan Pengendalian Renja SKPD sektor Pendidikan, Mental dan Spiritual					4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan				4 Laporan		4 Laporan						100%				
172	Laporan Triwulan Kompilasi Data Pembangunan sektor Pendidikan, Mental dan					4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan				4 Laporan		4 Laporan						100%				





# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Realisasi				Capaian						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
197	Dokumen Evaluasi RKP			1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				100%	100%	100%
198	kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)		0.00			100%		100%			100%					100%		100%		
199	Dokumen perencanaan daerah Kab/Kota yang rendah Karbon (RAD/GRK)		0.00		0.00	1 Dokumen	2 Dokumen				1 Dokumen	2 Dokumen				100%		100%		
200	Kelembagaan Penurunan Emisi di Kab/Kota		0.00		0.00	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota				1 Kab/Kota	2 Kab/Kota				100%		100%		
201	kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan		0.00	2 Kabupaten	600.00			100%	2 Kabupaten							100%		100%		
202	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Pokja Pembangunan Ekonomi Hijau		0.00	2 Kabupaten	300.00			2 Kabupaten	2 Kabupaten									2 Kabupaten	2 Kabupaten	100%
203	Dokumen perencanaan daerah yang rendah karbon		0.00	2 Dokumen	300.00			2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
204	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		0.00	0.90	2,747.48			90%	90%									100%	111%	
205	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia		0.00	4 Laporan	606.30			4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan	4 Laporan	



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Realisasi					Capaian				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
206	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan						
207	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Sektor Kesejahteraan Sosial		0.00	5 Laporan	900.00				5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan						
208	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial			4 Laporan					4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan						
209	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan		0.00	4 Laporan	1,241.18				4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan						
210	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Pemerintahan			5 Laporan					5 Laporan	5 Laporan				5 Laporan						
211	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		0.00	0.90	2,747.48				0.00	90%					100%					111%
212	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia		0.00	4 Laporan	606.30					1 laporan					1 laporan					100%
213	Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur			5 Laporan						1 laporan				1 laporan						100%





# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Lanjutan Tabel 2.3

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Realisasi					Capaian				
		Target		Rp.		Target		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
231	laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang													4 laporan						4 laporan
232	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang													1 laporan						1 laporan
233	laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman													1 laporan						1 laporan
234	Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman													1 laporan						1 laporan
235	Presentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		0,00		1.00		8,747.50		90%					97%						100%
236	Dokumen Ranc. Awal, Ranc., Ranc. Akhir RKP dan RKP								4 dokumen											4 dokumen
237	Dokumen RKP Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKP Tahun 2018		0,00		2		910.00							2 dokumen						2 dokumen
238	Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik		0,00						4 dokumen											4 dokumen



# RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi						Capaian					
		Rp.		Rp.		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
		Target		Target		Target	Target	Target	Target	Target	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K			
247	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	0,00	0,00	8 2,000,000 dokumen	8 2,000,000 dokumen	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
248	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	0,00	0,00		88 %	89%			8 dokumen	8 dokumen		100%	100				125%						
249	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	0,00	0,00		14 Dokumen	14 Dokumen						14 Dokumen					100%						
250	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	0,00	0,00		5 tahap	5 tahap						5 tahap					100%						
251	Jumlah data statistik dan spasial yang dipublikasikan	0,00	0,00		400	400						400					100%						
252	Penyediaan berita dan informasi perencanaan pembangunan pada web Bappeda dan media lainnya	0,00	0,00		12 bulan	12 bulan						12 bulan					100%						
253	Terlayannya administrasi perkantoran	0,00	0,00	1.00 1,250,000					90%	90%									111.11%	122%			
254	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	0,00	0,00	14 dokumen					14 dokumen	14 dokumen				14 dokumen					100%	100%			
255	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	0,00	0,00	200 IGT					150 IGT	200 IGT				50 IGT					33.330%	15%			

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



**Tabel 2.4**  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda  
Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4,091,570,000</b>	<b>4,000,850,000</b>	<b>4,472,041,831</b>	<b>6,232,850,000</b>	<b>6,192,460,000</b>	<b>3,961,688,663</b>	<b>3,744,898,335</b>	<b>3,855,691,733</b>	<b>5,684,023,343</b>	<b>5,607,334,563</b>	<b>129,881,337</b>	<b>255,951,665</b>	<b>616,350,098</b>	<b>548,826,657</b>	<b>585,125,437</b>	<b>12.84</b>	<b>10.38</b>
Pelaksanaan administrasi perkantoran	-	-	-	6,232,850,000	6,192,460,000		0	-	5,684,023,343	5,607,334,563	-	-	-	548,826,657	585,125,437	33.12	24.66
Penyediaan jasa surat menyurat	7,500,000	10,000,000	10,000,000	-	-	7,488,000	9,990,000	9,999,000			12,000	10,000				-25.00	16.77
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,280,500,000	1,333,800,000	1,739,500,000	-	-	1,189,677,688	1,197,862,821	1,399,757,678			90,822,312	135,937,179				-25.00	8.83
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36,600,000	36,600,000	36,600,000	-	-	2,446,300	23,402,800	23,781,100			34,153,700	13,197,200				-25.00	436.06
Penyediaan jasa kebersihan kantor	721,850,000	744,750,000	619,025,000	-	-	694,384,250	696,936,000	618,500,000			27,465,750	47,814,000				-25.00	-5.46
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	131,570,000	196,400,000	160,400,000	-	-	131,541,000	196,392,200	150,894,545			29,000	7,800				-25.00	7.36
Penyediaan alat tulis kantor	125,000,000	84,000,000	75,000,000	-	-	124,996,500	83,173,500	74,856,500			3,500	826,500				-25.00	-20.06
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37,500,000	35,000,000	49,555,200	-	-	37,402,600	34,821,200	48,968,600			97,400	178,800				-25.00	15.46
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60,000,000	60,000,000	50,000,000	-	-	59,998,000	59,888,300	49,989,400			2,000	111,700				-25.00	-8.34
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	194,850,000	195,000,000	195,000,000	-	-	194,494,115	194,698,356	194,954,000			355,885	301,644				-25.00	0.12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65,000,000	60,000,000	64,700,000	-	-	64,836,000	55,843,000	64,700,000			164,000	4,157,000				-25.00	-0.10

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan makanan dan minuman	178,400,000	165,000,000	125,000,000	-	-	117,658,000	135,355,000	124,843,300			60,742,000	29,645,000				-25.00	3.05
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	730,000,000	587,500,000	665,484,631	-	-	728,787,510	583,573,358	534,638,710			1,212,490	3,926,642				-25.00	-13.32
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	350,000,000	320,000,000	454,977,000	-	-	349,778,700	315,161,800	360,408,900			221,300	4,838,200				-25.00	1.52
Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	172,800,000	172,800,000	226,800,000	-	-	172,200,000	157,800,000	199,400,000			600,000	15,000,000				-25.00	7.90
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2,490,158,000</b>	<b>2,392,800,000</b>	<b>5,708,297,000</b>	<b>3,511,277,361.31</b>	<b>5,403,290,228</b>	<b>2,433,399,776</b>	<b>2,128,539,506</b>	<b>5,608,677,826</b>	<b>3,362,019,848</b>	<b>3,362,019,848</b>	<b>56,758,224</b>	<b>264,260,494</b>	<b>99,619,174</b>	<b>149,257,513</b>	<b>2,041,270,380</b>	<b>29.25</b>	<b>65.24</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	-	-	-	3,511,277,361.31	5,403,290,228	-	-	-	3,362,019,848	2,728,538,973	-	-	-	149,257,513	2,674,751,255	76.94	40.58
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	366,450,000	977,300,000	-	-	-	362,205,000	892,352,000	-	-	-	4,245,000	84,948,000	-	-	-	-50	50.00
Pengadaan peralatan gedung kantor	971,858,000	-	2,119,097,000	-	-	946,955,000	-	2,117,297,000	-	-	24,903,000	-	1,800,000	-	-	-109.02	33.33
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	75,000,000	-	-	-	-	73,752,000	-	-	-	-	1,248,000	-	-	-	-	-	33.33
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	160,000,000	140,000,000	727,000,000	-	-	150,480,000	137,877,000	696,328,796	-	-	9,520,000	2,123,000	30,671,204	-	-	-227.19	33.33
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	490,500,000	1,793,500,000	-	-	-	390,900,500	1,779,588,000	-	-	-	99,599,500	13,912,000	-	-	-182.82	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	450,650,000	520,000,000	557,000,000	-	-	435,388,276	448,467,006	555,122,830	-	-	15,261,724	71,532,994	1,877,170	-	-	-61.80	33.33

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	116,400,000	-	150,700,000	-	-	115,940,250	-	105,045,400	-	-	459,750	-	45,654,600	-	-	-64.73	33.33
Pelayanan acara-acara pemprov dan Bappeda Prov. Kaltim	296,300,000	215,000,000	269,500,000	-	-	295,529,250	210,043,000	269,495,800	-	-	770,750	4,957,000	4,200	-	-	-68.64	33.33
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001	53,500,000	50,000,000	91,500,000	-	-	53,150,000	48,900,000	85,800,000	-	-	350,000	1,100,000	5,700,000	-	-	-85.51	33.33
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>138,500,000</b>	<b>-</b>	<b>387,800,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113,368,000</b>	<b>-</b>	<b>385,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,132,000</b>	<b>-</b>	<b>2,600,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.00</b>	<b>119.89</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	138,500,000	-	266,300,000	-	-	113,368,000	-	265,800,000	-	-	25,132,000	-	500,000	-	-	46.14	67.23
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	121,500,000	-	-	-	-	119,400,000	-	-	-	-	2,100,000	-	-	50.00	50.00
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>392,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>31,870,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290,820,700</b>	<b>231,463,600</b>	<b>31,870,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101,179,300</b>	<b>68,536,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-45.93</b>	<b>-19.79</b>
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	392,000,000	-	-	-	-	290,820,700	-	-	-	-	101,179,300	-	-	-	-	-50.00	-74.19
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	100,000,000	18,997,000	-	-	-	97,326,150	18,997,000	-	-	-	2,673,850	-	-	-	9.50	97.33
Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah	-	60,000,000	12,873,200	-	-	-	59,691,050	12,873,200	-	-	-	308,950	-	-	-	10.73	99.49
Penyusunan SOP perencanaan	-	140,000,000	-	-	-	-	74,446,400	-	-	-	-	65,553,600	-	-	-	0.00	53.18
<b>Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial</b>	<b>7,372,214,800</b>	<b>16,213,150,000</b>	<b>2,488,820,000</b>	<b>1,520,200,000</b>	<b>192,250,000</b>	<b>7,091,707,174</b>	<b>15,365,595,963</b>	<b>2,467,964,900</b>	<b>1,515,761,490</b>	<b>38,682,932</b>	<b>280,507,626</b>	<b>847,554,037</b>	<b>20,855,100</b>	<b>4,438,510</b>	<b>153,567,068</b>	<b>-11.07</b>	<b>-11.48</b>

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	3,612,328,500	2,873,000,000	2,488,820,000	-	-	3,576,576,638	2,825,973,575	2,467,964,900	-	-	35,751,862	47,026,425	20,855,100	-	-	-19.55	-13.08
Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	-	-	-	973,400,000	1,375,450,000	-	-	-	969,513,160	1,348,563,578	-	-	-	3,886,840	26,886,422	41.30	46.37
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	3,133,584,500	-	-	-	-	3,010,564,501	-	-	-	-	123,019,999	-	-	-	-	-	-
Sistem informasi dan updating data	626,301,800	-	-	-	-	504,566,035	-	-	-	-	121,735,765	-	-	-	-	-	-
Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	-	844,000,000	-	-	-	-	825,804,500	-	-	-	-	18,195,500	-	-	-	0.00	0.00
Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	-	11,834,650,000	-	-	-	-	11,074,367,647	-	-	-	-	760,282,353	-	-	-	0.00	0.00
Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	-	661,500,000	-	-	-	-	639,450,241	-	-	-	-	22,049,759	-	-	-	0.00	0.00
Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	-	-	-	546,800,000	566,800,000	-	-	-	546,248,330	11,796,510	-	-	-	551,670	555,003,490	3.66	0.72
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>1,329,755,000</b>	<b>598,000,000</b>	<b>399,293,600</b>	-	-	-	<b>584,297,339</b>	<b>385,292,615</b>	-	-	<b>1,329,755,000</b>	<b>13,702,661</b>	<b>14,000,985</b>	-	-	<b>-34.99</b>	<b>14.49</b>
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	1,329,755,000	598,000,000	399,293,600	-	-	-	584,297,339	385,292,615	-	-	1,329,755,000	13,702,661	14,000,985	-	-	-34.99	14.49

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	8,018,540,000	-	-	-	-	6,997,945,113	-	-	-	-	1,020,594,887	-	-	-	-	-100	-100
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	4,967,240,000	-	-	-	-	4,439,162,638	-	-	-	-	528,077,362	-	-	-	-	-100	-100
Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional	3,051,300,000	-	-	-	-	2,558,782,475	-	-	-	-	492,517,525	-	-	-	-	-100	-100
<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah</b>	-	4,854,100,000	3,860,897,208	-	-	-	4,404,045,009	3,719,902,547	-	-	-	450,054,991	140,994,661	-	-	-20.46	28.16
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	-	1,695,800,000	1,689,819,369	-	-	-	1,542,101,929	1,678,900,528	-	-	-	153,698,071	10,918,841	-	-	-0.35	36.29
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	-	1,390,000,000	1,227,077,839	-	-	-	1,319,111,830	1,208,698,247	-	-	-	70,888,170	18,379,592	-	-	-11.72	30.54
Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	-	-	944,000,000	-	-	-	-	832,303,772	-	-	-	-	111,696,228	-	-	-	-
Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional	-	1,768,300,000	-	-	-	-	1,542,831,250	-	-	-	-	225,468,750	-	-	-	-100.00	0.00
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	625,000,000	-	-	-	-	597,349,750	-	-	-	-	27,650,250	-	-	-	-	-100	-100
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	453,750,000	-	-	-	-	453,105,750	-	-	-	-	644,250	-	-	-	-	-100	-100

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	171,250,000	-	-	-	-	144,244,000	-	-	-	-	27,006,000	-	-	-	-	-100	-100
<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	-	<b>330,000,000</b>	<b>1,687,047,461</b>	-	-	-	<b>294,214,768</b>	<b>1,530,631,960</b>	-	-	-	<b>35,785,232</b>	<b>156,415,501</b>	-	-	<b>411.23</b>	<b>420.24</b>
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	-	200,000,000	97,500,000	-	-	-	170,141,900	84,878,274	-	-	-	29,858,100	12,621,726	-	-	-51.25	-50.11
Penyusunan Analisis Jabatan	-	40,000,000	25,000,000	-	-	-	38,879,599	8,960,000	-	-	-	1,120,401	16,040,000	-	-	-37.50	-76.95
Koordinasi penyusunan Rencana Kerja	-	90,000,000	35,938,900	-	-	-	85,193,269	35,938,900	-	-	-	4,806,731	-	-	-	-60.07	-57.81
Koordinasi penyusunan RKA dan DPA	-	-	39,974,000	-	-	-	-	33,021,000	-	-	-	-	6,953,000	-	-	100	100
Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	913,739,061	-	-	-	-	850,406,991	-	-	-	-	63,332,070	-	-	100	100
Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	-	-	574,895,500	-	-	-	-	517,426,795	-	-	-	-	57,468,705	-	-	100	100
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	<b>2,027,970,000</b>	<b>3,509,906,000</b>	-	-	-	<b>2,002,483,885</b>	<b>3,348,595,724</b>	0	-	-	<b>25,486,115</b>	<b>161,310,276</b>	<b>73.07</b>	<b>67.22</b>
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	-	1,857,580,000	3,459,906,000	-	-	-	1,834,533,885	3,299,568,024	-	-	-	23,046,115	160,337,976	86.26	79.86
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	170,390,000	50,000,000	-	-	-	167,950,000	49,027,700	-	-	-	2,440,000	972,300	-70.66	-70.81

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan</b>	<b>12,999,028,500</b>	<b>3,152,000,000</b>	<b>3,171,450,000</b>	<b>4,569,800,000</b>	<b>7,215,400,000</b>	<b>12,008,800,899</b>	<b>3,099,186,710</b>	<b>2,879,195,850</b>	<b>4,440,385,855</b>	<b>6,550,747,118</b>	<b>990,227,601</b>	<b>52,813,290</b>	<b>292,254,150</b>	<b>129,414,145</b>	<b>664,652,882</b>	<b>-11.123</b>	<b>-11.363</b>
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	1,423,421,900	-	-	-	-	1,414,894,531	-	-	-	-	8,527,369	-	-	-	-	-100.00	-100
Penetapan RPJMD	1,328,850,000	-	-	-	-	1,308,353,530	-	-	-	-	20,496,470	-	-	-	-	-100.00	-100
Penyusunan RPJMD	-	-	-	450,000,000	2,550,000,000	-	-	-	406,483,900	2,026,454,822	-	-	-	-	-	258.31	398.53
Penyusunan Rancangan RKPD	1,201,737,500	918,000,000	832,950,000	592,800,000	910,000,000	1,160,248,112	889,246,325	778,330,270	588,042,250	839,002,834	41,489,388	28,753,675	54,619,730	4,757,750	70,997,166	-6.07	-6.92
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	2,166,056,800	2,084,000,000	2,243,500,000	1,621,000,000	1,105,000,000	2,157,448,571	2,059,945,385	2,007,676,580	1,561,135,084	1,076,360,077	8,608,229	24,054,615	235,823,420	59,864,916	28,639,923	1.79	-3.47
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	-	-	-	175,000,000	170,000,000	-	-	-	174,871,720	147,861,000	-	-	-	-	-	-1.43	-15.45
Penetapan RKPD	150,000,000	150,000,000	95,000,000	-	-	149,200,000	149,995,000	93,189,000	-	-	800,000	5,000	1,811,000	-	-	-18.33	-18.77
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	290,700,000	-	-	-	-	277,869,025	-	-	-	-	12,830,975	-	-	-	-	-100	-100
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	410,416,275	-	-	-	-	407,502,670	-	-	-	-	2,913,605	-	-	-	-	-100	-100
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1,169,972,225	-	-	-	-	942,302,076	-	-	-	-	227,670,149	-	-	-	-	-100	-100
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,782,750,000	-	-	-	-	1,531,900,350	-	-	-	-	250,849,650	-	-	-	-	-100	-100
Gugus Kendali Pembangunan Kaltim Bangkit 2013	875,123,800	-	-	-	-	718,381,700	-	-	-	-	156,742,100	-	-	-	-	-100	-100
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	2,200,000,000	-	-	-	-	1,940,700,334	-	-	-	-	259,299,666	-	-	-	-	-100	-100

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan				712,400,000	681,400,000				692,598,901	671,921,125	-	-	-	19,801,099	9,478,875	-4.35	-2.99
Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD				1,018,000,000	1,799,000,000				1,017,254,000	1,789,147,260	-	-	-	746,000	9,852,740	76.72	75.88
<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>1,044,500,000</b>	<b>3,663,150,000</b>	<b>2,268,074,000</b>	<b>1,223,000,000</b>	<b>2,032,000,000</b>	<b>1,008,080,543</b>	<b>3,524,391,129</b>	<b>2,113,665,005</b>	<b>1,154,648,678</b>	<b>2,003,862,593</b>	<b>36,419,457</b>	<b>138,758,871</b>	<b>154,408,995</b>	<b>68,351,322</b>	<b>28,137,407</b>	<b>23.64</b>	<b>24.70</b>
Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	1,044,500,000	2,638,150,000	1,411,454,000	-	-	1,008,080,543	2,560,060,083	1,264,672,395	-	-	36,419,457	78,089,917	146,781,605	-	-	-84.19	-25
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	1,025,000,000	856,620,000	386,800,000	773,800,000	-	964,331,046	848,992,610	352,218,243	763,770,527	-	60,668,954	7,627,390	34,581,757	10,029,473	-8.17	19.80
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	-	-	-	386,800,000	622,000,000	-	-	-	371,061,653	615,728,971	-	-	-	15,738,347	6,271,029	60.81	65.94
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	-	-	-	468,800,000	636,200,000	-	-	-	431,368,782	624,363,095	-	-	-	37,431,218	11,836,905	38.81	44.74
<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>1,513,000,000</b>	<b>1,567,000,000</b>	<b>1,357,580,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,486,561,090</b>	<b>1,528,229,359</b>	<b>1,298,055,792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,438,910</b>	<b>38,770,641</b>	<b>59,524,208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.14</b>	<b>-6.34</b>
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	869,500,000	1,007,000,000	864,870,000	-	-	859,720,314	979,261,970	835,794,446	-	-	9,779,686	27,738,030	29,075,554	-	-	-0.27	-1.39
Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan	643,500,000	-	-	-	-	626,840,776	-	-	-	-	16,659,224	-	-	-	-	-100.00	-100.00

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual		560,000,000	492,710,000	-	-		548,967,389	462,261,346			-	11,032,611	30,448,654			-12.02	-15.79
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	4,428,700,000	-	-	-	-	4,035,067,949	-	-	-	-	393,632,051	-	-	-	-	-100	-100
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	2,170,800,000	-	-	-	-	1,939,654,200	-	-	-	-	231,145,800	-	-	-	-	-100	-100
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	397,075,000	-	-	-	-	348,352,525	-	-	-	-	48,722,475	-	-	-	-	-100	-100
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana wilayah	1,878,825,000	-	-	-	-	1,747,061,224	-	-	-	-	131,763,776	-	-	-	-	-100	-100
<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur</b>	3,685,842,000	2,894,900,000	2,504,670,000	-	-	3,458,305,849	2,818,745,333	2,466,354,680	-	-	227,536,151	76,154,667	38,315,320	-	-	-16.02	-14.34
Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan aparat	3,095,600,000	-	-	-	-	2,905,828,559	-	-	-	-	189,771,441	-	-	-	-	-100	-100
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	590,242,000	-	-	-	-	552,477,290	-	-	-	-	37,764,710	-	-	-	-	-100	-100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	-	2,319,500,000	1,803,730,000	-	-	-	2,261,949,510	1,803,018,880	-	-	-	57,550,490	711,120	-	-	-22.24	-20.29
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur	-	575,400,000	700,940,000	-	-	-	556,795,823	663,335,800	-	-	-	18,604,177	37,604,200	-	-	21.82	19.13

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah</b>		1,892,300,000	1,736,200,000				1,705,767,528	1,705,522,684								-8.25	-0.01
Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD		1,892,300,000	1,736,200,000				1,705,767,528	1,705,522,684								-8.25	-0.01
<b>Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		650,000,000	663,480,000	200,000,000			603,929,199	605,392,380	192,603,126							-34.62	-34.05
Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota		300,000,000	380,480,000	100,000,000			277,571,200	367,074,880	95,422,200							-33.33	-32.81
Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca		350,000,000	283,000,000	100,000,000			326,357,999	238,317,500	97,180,926							-35.71	-35.11
<b>Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	-	-	-	1,773,200,000	2,405,000,000	-	-	-	1,763,508,261	2,328,478,266	-	-	-	9,691,739	76,521,734	35.63	24.26
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	396,000,000	592,300,000	-	-	-	389,662,400	589,049,251	-	-	-	6,337,600	3,250,749	49.57	33.85
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial				433,400,000	643,400,000				433,031,613	629,145,490	-	-	-	368,387	14,254,510	48.45	31.17
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan				943,800,000	1,169,300,000				940,814,248	1,110,283,525	-	-	-	2,985,752	59,016,475	23.89	15.26
<b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>	-	-	2,360,900,000	2,200,000,000	-	-	-	2,318,934,433	2,112,484,554	-	-	-	41,965,567	87,515,446	-6.82	-8.90	

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023

-----



Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	-	-	767,800,000	1,129,500,000	-	-	-	753,260,620	1,056,411,562	-	-	-	14,539,380	73,088,438	-	47.11	40.25
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	-	-	1,110,700,000	539,100,000	-	-	-	1,088,461,663	587,944,028	-	-	-	22,238,337	(48,844,028)	-	-51.46	-45.98
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	-	-	482,400,000	477,400,000	-	-	-	477,212,150	468,128,964	-	-	-	5,187,850	9,271,036	-	-1.04	-1.90



Berdasarkan Tabel 2.3 kinerja Bappeda Prov. Kaltim pada tahun 2014-2018 dapat terlaksana dengan baik, karena seluruh target pada program dan kegiatan dapat tercapai. Begitu pula dengan rasio antara anggaran dan realisasi berdasarkan Tabel 2.4, rasio antara anggaran dan realisasi program dan kegiatan Bappeda Prov. Kaltim tahun 2014-2018 dapat dikatakan baik karena rasio program dan kegiatan meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh prosedur/mekanisme yang semakin baik. Hanya saja beberapa program rasionya mengalami naik turun dikarenakan perubahan kegiatan antar tahunnya. Perubahan tersebut dikarenakan pemisahan Provinsi Kaltim menjadi Provinsi Kaltim dan Kaltara, diikuti penancangan RAD-GRK secara Nasional, dan diikuti penyesuaian kegiatan pada Renja.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Prov. Kaltim mempunyai permasalahan yang dapat menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah. Seiring berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Prov. Kaltim memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Kalimantan Timur Berdaulat.

Dalam usaha pencapaian Kalimantan Timur Berdaulat, Bappeda Prov. Kaltim memiliki dinamika tantangan pembangunan. Adapun tantangan yang masih dihadapi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya



2. Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran (Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD)
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi)
4. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid
5. Proses updating data pada aplikasi yang lambat
6. Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.
7. Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat
8. Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi
9. Keterbatasan tenaga analis data dan informasi
10. Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BAPPEDA PROV. KALTIM**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim**

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Kewenangan Kepala Badan yaitu Penyusunan Kebijakan, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan, Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan, pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian, mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, dan Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian , sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Bappeda harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga lima tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:



1. Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disebabkan oleh proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran (Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD)
3. Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh : (1) Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid; (2) Keterbatasan tenaga analis data dan informasi; (3) proses *updating* data pada aplikasi yang lambat;
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan: (1) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara *online* (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi); (2) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik; (3) Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi; (4) Proses *updating* data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat
5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperoleh dari analisis seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

MISI	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran	Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
		Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota	Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran (Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD)
		Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan	Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid
			Keterbatasan tenaga analis data dan informasi
			Proses <i>updating</i> data pada aplikasi yang kurang cepat
	Belum optimalnya capaian target pembangunan sesuai dengan rencana	Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan	Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara <i>online</i> (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi)
			Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik
			Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi



MISI	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
			proses <i>updating</i> data hasil capaian pelaksanaan progam dan kegiatan yang lambat

Untuk menjawab masalah permasalahan diatas dan mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, Bappeda Prov. Kaltim diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan efisien. Sehingga dalam peaksanaannya diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta Visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

#### **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera



**Tabel 3.2. Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023**

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2019-2023
Pembangunan Berkelanjutan Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

**Tabel 3.3. Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing



**B. Misi Daerah**

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS</b>			
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan nilai agama, seni, nilai tradisi, pendidikan karakter dan bahasa	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Peningkatan penanganan masalah kesehatan jiwa
			Optimalisasi fungsi taman budaya dan anjungan budaya kaltim
	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi dokter dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)
			Peningkatan fungsi dan pengelolaan RSI Samarinda sebagai RSUD
			Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
			Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dengan penguatan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan	
			Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa Kaltim Tuntas	
			Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu ( <i>Boarding School</i> )	
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan insentif	
			Optimalisasi perlindungan anak	Penyediaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan perlindungan anak
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan pengarusutamaan gender		Peningkatan kesadaran kesetaraan gender di kalangan masyarakat
				Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya		Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi
				Pengembangan karya seni budaya pemuda
		Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha		Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja		Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja
				Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
Optimalisasi penyaluran tenaga kerja				
<b>MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN</b>				
Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi	Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; Peningkatan kualitas hidup perempuan miskin	
			Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Peningkatan Produksi pangan pada lahan potensial dan pemanfaatan lahan kritis melalui kemitraan	Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
	Meningkatnya usaha ekonomi rakyat	Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM
			Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola Kemitraan dan pendampingan.
			Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
		Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan ekosistem tropis	Peningkatan promosi dan paket wisata dan mengembangkan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase budaya dan pariwisata Kaltim
			Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam	Peningkatan realisasi nilai investasi sektor industri pengolahan untuk membuka lapangan kerja baru sektor industri hilir	Pengembangan Industri Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian
			Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri
	Meningkatnya <i>output</i> ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Peningkatan nilai tambah dan daya saing Komoditi Unggulan Daerah	Peningkatan produktivitas lahan perkebunan
			Peningkatkan pemanfaatan limbah Perkebunan
			Pengelolaan kelautan dan Perikanan berkelanjutan
			Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan
			Memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi kerakyatan
Pengembangan multi-produk hutan			
<b>MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN</b>			
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah	Peningkatkan ketersediaan energi dengan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Pengembangan Kelistrikan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (Bio Gas, Matahari, Air, Angin)

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Perbaikan Tata niaga pengelolaan BBM	Peningkatan efisiensi distribusi BBM
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Peningkatan akses air baku, air minum dan sanitasi layak	Peningkatan infrastruktur penyediaan air baku dan layanan air minum
	Meningkatnya konektivitas antar kawasan dan daerah 3T	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan Provinsi kelas 1
			Peningkatan Pelabuhan Internasional Kariangau Balikpapan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional dengan Penuntasan aksesibilitas dan konektivitas transportasi antara sentra produksi ke kawasan industri
	Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK	Peningkatan penyediaan jaringan TIK	
<b>MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN</b>			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi GRK	Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
			Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan ruang
			Peningkatan Upaya Perlindungan Lahan Berhutan Alam dan Gambut
			Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kemitraan swasta dan masyarakat
			Mempertahankan Lahan berhutan di pola ruang perkebunan
	Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku	Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Air	Peningkatan Upaya Rehabilitasi DAS Kritis Peningkatan fungsi Danau Danau Jempang, Semayang dan Melintang
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan pengamanan kawasan rawan banjir	Penanganan banjir terpadu di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi
<b>MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b>			
Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional	Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
dan berorientasi pelayanan publik	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah
			Peningkatan inovasi pelayanan publik melalui Pemberian insentif/reward bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota inovatif
	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan Kesadaran Guna Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Sembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan
4. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
5. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan



6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

### **C. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur**

#### **Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)**

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (*Boarding School*)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa



15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara



33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparaturng sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

### **3.3. Penelaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim**

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2015-2019, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,  
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Bappeda tetap mengacu pada Renstra Kementerian BPPN/Bappenas

### **3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

#### **3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur**

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

##### **a. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).



b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

b.1. Jaringan Transportasi Darat

b.2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

b.3. Transportasi Laut

b.4. Transportasi Udara

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan IV-4 energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan



pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air



diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

#### **3.4.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang**

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

a.1. Kawasan Lindung Bawahan

a.2. Kawasan Lindung Setempat

a.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan

a.4. Kawasan rawan bencana alam

a.5. Kawasan lindung geologi

a.6. Kawasan lindung lainnya

b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu:

b.1. Kawasan peruntukan hutan produksi

b.2. Kawasan peruntukan pertanian

b.3. Kawasan peruntukan perikanan

b.4. Kawasan peruntukan industri

b.5. Kawasan peruntukan pariwisata

b.6. Kawasan peruntukan pemukiman

b.7. Kawasan peruntukan pertambangan

b.8. Kawasan peruntukan lainnya



### **3.5 Perumusan Isu- Isu Strategis Bappeda Prov. Kaltim**

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, maka dirumuskan isu- isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
5. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
6. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
7. Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi dan Misi jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra OPD. Visi dan Misi tersebut akan menjadi pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait bidang masing-masing serta menjadi target-target kinerja untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal lembaga/instansi di masa depan (*clarity of direction*) sebagai dukungan sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Pernyataan Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai target masa depan yang diharapkan akan mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil. Misi yang harus diemban merupakan dasar dari sasaran pembangunan oleh pemerintah daerah sekaligus mengawali penyusunan program/kegiatan dalam perencanaan kinerja kelembagaan.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Prov. Kaltim, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Visi dan Misi. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

**Tujuan** merupakan salah satu komponen dalam perencanaan strategis sehingga perlu dirumuskan gambaran tentang keadaan yang diinginkan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya



harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan Visi dan Misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing Misi.

Adapun **tujuan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023** adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi).

**Sasaran** merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya. Berdasarkan tujuan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, maka **Sasaran** yang ingin dicapai BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan indikator proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.
2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah, dengan indikator persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur.
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektor dan spasial.



Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT</b>									
<b>MISI 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik</b>									
	<b>Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien</b>	<b>Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)</b>	<b>77,49</b>	<b>77,50</b>	<b>78,00</b>	<b>78,50</b>	<b>79,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
S1.	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	85%	87%	89%	92%	94%	96%	<b>96%</b>
S2.	Terkendalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	80%	85%	89%	91%	95%	100%	<b>100%</b>
S3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	60%	63%	67%	70%	75%	80%	<b>80%</b>



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Prov. Kaltim, diperlukan strategi dan kebijakan yang pro-pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan. Penyusunan strategi dan kebijakan melibatkan keseluruhan bidang-bagian karena dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang maupun bidang-bagian. Hal tersebut dipandang perlu, karena koordinasi dan sinkronisasi akan sangat mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan dalam meraih visi yang diemban.

**Strategi** adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Dalam pencapaian Visi dan Misinya, BAPPEDA Prov. Kaltim memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai Visi dan Misi BAPPEDA Prov. Kaltim dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan. Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil,



produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BAPPEDA Prov. Kaltim menyusun strategi dan arah kebijakan dari hasil analisis Memetakan Masalah Ke Masalah ke Arsitektur/Piramida Permasalahan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim**

<b>VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat</b>			
<b>MISI V : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	1. Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Perubahan tata laksana Musrenbang, Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Daerah lainnya
		2. Meningkatkan kualitas SDM Perencana	Meningkatkan pelatihan SDM Perencana



<b>VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat</b>			
<b>MISI V : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	1. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah
	3. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi	Integrasi aplikasi siData, SIPD dengan SIPPD, TEPR dan Geospasial
		2. Mengoptimalkan Satu Data Satu Peta (One data one map) melalui pemutakhiran data/informasi	Meningkatkan pengembangan data dan analisis pembangunan (data sektoral dan spasial)



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.

#### **6.1. Rencana Program**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas. Berikut program-program BAPPEDA Prov. Kaltim yang disusun untuk mencapai visi dan misinya:



Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Strategi

Sasaran		Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
<b>S1 : Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota</b>			
1.	Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran
2	Meningkatkan kualitas SDM Perencana	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian
		Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
		Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD
<b>S2 : Terkendalinya Capaian Sasaran Pembangunan Daerah</b>			
1.	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah



Sasaran		Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
		Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota
<b>S3: Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah</b>			
1.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan
2.	Menyediaan dan pemutakhiran data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan		

Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim selama lima tahun terbagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu:

**A. Program yang terkait Perencanaan Pembangunan, yaitu:**

**1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan**

Perencanaan pembangunan Kalimantan Timur difokuskan pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Program ini ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai implementasi RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPDP Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan program ini harus dukungan oleh seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah, hingga pihak swasta.

**2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah**

Dalam bidang perencanaan pembangunan daerah salah satu bagian adalah perencanaan pembangunan Daerah Jangka Menengah, yang kemudian akan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDP, Renstra, dan Renja. Sehingga dengan Program perencanaan pembangunan daerah jangka menengah ini diharapkan dalam penyusunan



dokumen RPJMD, akan dihasilkan dokumen yang mampu menjadi pedoman yang dapat merangkul segala aspek dalam pembangunan Kalimantan Timur.

**3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang**

Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang merupakan perencanaan yang memiliki pandangan jauh kedepan dalam bagian tata pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam program ini akan dihasilkan suatu Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), yang memedomani RPJPN. Sehingga dokumen RPJPD ini merupakan langkah besar dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan kemudian akan mampu menarik dokumen perencanaan lainnya, yang akan berimbas pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari program perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pada pengembangan ruang gerak roda perekonomian Kalimantan Timur. Kinerja bidang ekonomi terkait pada perencanaan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program perekonomian tahunan. Perlu perhatian khusus pada permasalahan perekonomian Kalimantan Timur saat ini, terutama pada sektor migas dan batubara yang kian hari kian menipis produktivitasnya padahal sektor ini merupakan kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur.

**5. Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah**

Perencanaan prasarana wilayah merupakan program perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan pada peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pembangunan berbasis kewilayahan. Bidang ini merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan program tahunan terkait peningkatan prasarana wilayah. Sisi positif dalam program ini sekaligus pendukung utama dalam pelaksanaan prasarana wilayah adalah sarana maupun infrastruktur perhubungan, prasarana



sumber daya air dan tata ruang, serta cipta karya perumahan dan pemukiman yang harus diperhatikan agar terjadi peningkatan aksesibilitas terutama di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, bidang prasarana wilayah akan melaksanakan perencanaan pembangunan dengan mengkoordinir tugas-tugas sub-sub bidang yang berada di bawahnya melalui program ini.

**6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya**

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya merupakan salah satu program dasar pembangunan daerah karena menyangkut tentang kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dan sebagainya. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya memiliki banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya fasilitas di wilayah terpencil, sehingga akses pendidikan maupun kesehatan masih belum sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi program antara Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan bidang teknis lainnya agar terjadi keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas Pemerintahan dan Sosial Budaya

**7. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu program utama dalam peningkatan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Program ini disusun untuk mendukung perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah selama lima tahun ke depan sehingga setiap tahapannya memerlukan pengendalian dan evaluasi baik di bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan aparatur, serta pengembangan sumber daya manusia.



**8. Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah**

Program ini disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dimana pengendalian rencana pembangunan daerah merupakan tolak ukur untuk pencapaian target pembangunan sesuai rencana pembangunan daerah.

**9. Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah**

Program ini disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dimana data dan analisis pembangunan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan dari perencanaan pembangunan. Semakin akurat data dan analisis pembangunan daerah, semakin baik pula kualitas perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, program pengembangan data dan analisis pembangunan daerah disusun sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

**10. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Program ini ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai implementasi RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim dan pengendalian serta evaluasi rencana pembangunan daerah merupakan tolak ukur untuk pencapaian target pembangunan sesuai rencana pembangunan daerah.

**B. Program yang terkait operasional dan manajerial bersama, yaitu:**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

**6.2. Rencana Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja BAPPEDA Prov. Kaltim, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:



**A. Program dan Kegiatan yang terkait Perencanaan Pembangunan**

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai koordinator pembangunan daerah serta Perencanaan Pembangunan Sektoral mencakup kordinasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta kompilasi data dan analisis pembangunan daerah, yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

- Penyusunan rancangan RKPD;
- Penyusunan RPJMD;
- Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
- Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi
- Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksnaan Sistem informasi Perencanaan
- Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD
- Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
- Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan
- Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah

2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata.

3. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

4. Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah



- Koordinasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan;
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
5. Program Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Daerah
- Monitoring dan Pelaporan hasil pelaksanaan Pembangunan
  - Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD, RPJMN dan RKPD
6. Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi
  - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
7. Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah
- Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah
  - Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
  - Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
  - Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah

**B. Program dan Kegiatan Operasional dan Manajerial Bersama**

Program ini merupakan program yang juga digunakan oleh perangkat daerah lainnya yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Pelaksanaan Administrasi Pelaporan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
  - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
  - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kapasitas Pemerintah Daerah
  - Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

### 6.3. Indikator Pencapaian Tujuan

**Masukan (*Input*)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

**Keluaran (*Output*)** adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

**Hasil (*Outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholders* dan masyarakat.

**Dampak (*Impact*)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

### 6.4. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis pembangunan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan BAPPEDA Prov.



Kaltim. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat.

Pembiayaan indikatif Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji pada lampiran tabel 6.2

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM  
TAHUN 2019-2023**



**Tabel 6.2  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp						
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
<b>Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>																							
						48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		100 %	8,585,850,000.00	100	40,229,250,000	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah			
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	4 03 48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	78,53%	80%	7,085,850,000.00	85%	8,585,850,000.00	90%	7,385,850,000.00	95%	8,585,850,000.00	100 %	8,585,850,000.00	100	40,229,250,000	100	40,229,250,000	Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah			
		4 03 48 01	Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun 2019	0 dokumen	2 dokumen	1,120,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2 dokumen	0.00	2 dokumen	1,120,000,000	2 dokumen	1,120,000,000	Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		4 03 48 02	Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	0 dokumen	1 dokumen	1,200,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2 dokumen	1,200,000,000	2 dokumen	1,200,000,000	Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		4 03 48 04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan Forum pembahasan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan	0 forum	3 forum	1,500,000,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	3 forum	1,500,000,000	3 forum	1,500,000,000	Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	bn, smd, luarPrv		
		4 03 48 05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	0 dokumen	1 dokumen	960,000,000.00	3 Dokumen	2,550,000,000.00	2 dokumen	2,460,000,000.00	2 dokumen	2,540,000,000.00	2 dokumen	2,540,000,000.00	2 dokumen	11,050,000,000	2 dokumen	11,050,000,000	Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		4 03 48 06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	0 tahap	6 Tahap	919,100,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6 Tahap	919,100,000	6 Tahap	919,100,000	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		4 03 48 07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Jumlah Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	0 Dokumen	8 Dokumen	1,386,750,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	8 Dokumen	1,386,750,000	8 Dokumen	1,386,750,000	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		4 03 48 08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	3 Dokumen	-	0.00	3 Dokumen	2,230,000,000.00	2 Dokumen	1,120,000,000.00	4 Dokumen	2,240,000,000.00	5 Dokumen	2,240,000,000.00	5 Dokumen	7,830,000,000	5 Dokumen	7,830,000,000	Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
		4 03 48 10	Penyusunan Dokumen Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPPD)	0 Dokumen	-	0.00	2 Dokumen	2,305,850,000.00	2 Dokumen	2,305,850,000.00	2 Dokumen	2,305,850,000.00	2 Dokumen	2,305,850,000.00	2 Dokumen	2,305,850,000.00	2 Dokumen	9,223,400,000	2 Dokumen	9,223,400,000	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 48 11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Diverifikasi/Evaluasi	0 Dokumen	-	0	112 Dokumen	1,500,000,000	66 Dokumen	1,500,000,000	66 Dokumen	1,500,000,000	66 Dokumen	1,500,000,000	66 Dokumen	1,500,000,000	66 Dokumen	6,000,000,000	66 Dokumen	6,000,000,000	Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		Meningkatkan kualitas SDM Perencana		4 03 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	13,80%	15%	3,407,400,000.00	17%	3,407,400,000.00	20%	3,407,400,000.00	23%	3,407,400,000.00	25%	3,407,400,000.00	25%	17,037,000,000	25%	17,037,000,000	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	
4 03 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			Jumlah Rapat Koordinasi	36 Rapat	38 Rapat	2,077,400,000.00	40 Rapat	2,077,400,000.00	40 Rapat	2,077,400,000.00	42 Rapat	2,077,400,000.00	45 Rapat	2,077,400,000.00	45 Rapat	10,387,000,000	45 Rapat	10,387,000,000	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv		
4 03 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15 orang	30 orang	1,330,000,000.00	40 Orang	1,330,000,000.00	50 Orang	1,330,000,000.00	60 Orang	1,330,000,000.00	70 Orang	1,330,000,000.00	70 Orang	6,650,000,000	70 Orang	6,650,000,000	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	bn, smd, luarPrv		

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target (17)	Rp (18)		
						Target (7)	RP (8)	Target (9)	RP (10)	Target (11)	RP (12)	Target (13)	RP (14)	Target (15)	RP (16)				
		4 03 30	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian</b>	53,23%	60%	4.824.900.000,00	65%	5.324.900.000,00	75%	5.324.900.000,00	80%	5.324.900.000,00	90%	5.324.900.000,00	90	26.124.500.000	Bidang Ekonomi	
		4 03 30 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	0 Laporan	1 Laporan	1.257.600.000,00	4 Laporan	1.507.600.000,00	4 Laporan	1.507.600.000,00	4 Laporan	1.507.600.000,00	4 Laporan	1.507.600.000,00	4 Laporan	7.288.000.000	Sub Bidang Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 30 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	0 Laporan	1 Laporan	897.000.000,00	4 Laporan	1.147.000.000,00	4 Laporan	1.147.000.000,00	4 Laporan	1.147.000.000,00	4 Laporan	1.147.000.000,00	4 Laporan	5.485.000.000	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd
		4 03 30 05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	0 Laporan	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	2.670.300.000,00	4 Laporan	13.351.500.000	Sub Bidang INDAGKOP, Investasi dan Pariwisata	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 46	<b>Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	38,6%	50%	2.564.300.000,00	60%	3.064.300.000,00	70%	3.064.300.000,00	80%	3.064.300.000,00	90%	3.064.300.000,00	90	14.821.500.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
		4 03 46 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	0 Laporan	1 Laporan	705.000.000,00	1 Laporan	905.000.000,00	1 Laporan	905.000.000,00	1 Laporan	905.000.000,00	1 Laporan	905.000.000,00	1 Laporan	4.325.000.000	Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 46 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	0 Laporan	1 Laporan	710.000.000,00	1 Laporan	910.000.000,00	1 Laporan	910.000.000,00	1 Laporan	910.000.000,00	1 Laporan	910.000.000,00	1 Laporan	4.350.000.000	Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 46 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			
		4 03 46 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Laporan	0 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			
		4 03 46 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	0 Laporan	1 Laporan	1.149.300.000,00	1 Laporan	1.249.300.000,00	1 Laporan	1.249.300.000,00	1 Laporan	1.249.300.000,00	1 Laporan	1.249.300.000,00	1 Laporan	6.146.500.000	Sub Bidang Pemerintahan	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 46 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			
		4 03 47	<b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah</b>	45,2%	55%	2.850.000.000,00	65%	3.350.000.000,00	75%	3.350.000.000,00	85%	3.350.000.000,00	90%	3.350.000.000,00	90	16.250.000.000	Bidang Prasarana Wilayah	
		4 03 47 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	0 Laporan	2 Laporan	1.225.900.000,00	2 Laporan	1.425.900.000,00	2 Laporan	1.425.900.000,00	2 Laporan	1.425.900.000,00	2 Laporan	1.425.900.000,00	2 Laporan	6.929.500.000	Sub Bidang Prasarana Perhubungan	kk, ktm, mah, psr, ppu, bpn
		4 03 47 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	0 Laporan	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	1.012.700.000,00	1 Laporan	5.063.500.000	Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 47 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah Laporan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			
		4 03 47 02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
		4 03 47 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	4 Laporan	1 Laporan	611.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	911.400.000,00	1 Laporan	4.257.000.000	Sub Bidang Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4 03 10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77,69 (BB)	78 (BB)	3.621.425.000,00	78,5 (BB)	3.621.425.000,00	79 (A)	3.621.425.000,00	80 (A)	3.621.425.000,00	81 (A)	3.621.425.000,00	81 (A)	18.107.125.000	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	
		4 03 10 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	431.425.000,00	4 Dokumen	431.425.000,00	4 Dokumen	431.425.000,00	4 Dokumen	431.425.000,00	4 Dokumen	431.425.000,00	4 Dokumen	2.157.125.000	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 10 02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	190.000.000,00	4 Dokumen	950.000.000	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 10 03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	0 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	3.000.000.000,00	5 Dokumen	15.000.000.000	Sub. Bagian Penyusunan Program & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
	Terkendalinya Capaian Sasaran Pembangunan Daerah	4 03 42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45,68%	50%	3.772.160.000,00	60%	3.772.160.000,00	70%	3.972.160.000,00	80%	3.772.160.000,00	90%	3.772.160.000,00	90	19.060.800.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	
		4 03 42 01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPI	0 Dokumen	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	2.038.160.000,00	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	1.838.160.000,00	3 Dokumen	9.390.800.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 42 03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	0 laporan	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	1.934.000.000,00	6 laporan	9.670.000.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
				Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan	4 03 50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	76%	1.911.940.000,00	78%	1.911.940.000,00	81%	2.911.940.000,00	85%	1.911.940.000,00	87%	1.911.940.000,00	87	10.559.700.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	
		4 03 50 01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen	1.206.540.000,00	14 dokumen	6.032.700.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv
		4 03 50 02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik	0 IGT	200 IGT	705.400.000,00	200 IGT	705.400.000,00	200 IGT	1.705.400.000,00	200 IGT	705.400.000,00	200 IGT	705.400.000,00	200 IGT	4.527.000.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd, luarPrv

## RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4 03 49	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	82,30%	85%	1.500.000.000,00		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	96%	1.500.000.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi		
		4 03 49 01	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengendalian Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	0 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	750.000.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	smd, luarPrv	
		4 03 49 02	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Rencana Pembangunan Provinsi Dengan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	750.000.000	Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	bru, kbr, kkr, ktm, mah, psr, ppu, bpn, btg, smd	
		4 03 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	85%	8.450.375.000,00	86%	8.450.375.000,00	87%	8.450.375.000,00	88%	8.450.375.000,00	90%	8.450.375.000,00	90	42.251.875.000	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian		
		4 03 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani	67 Instansi/Lembaga	69 Instansi/Lembaga	8.450.375.000,00	70 Instansi/Lembaga	8.450.375.000,00	71 Instansi/Lembaga	8.450.375.000,00	73 Instansi/Lembaga	8.450.375.000,00	75 Instansi/Lembaga	8.450.375.000,00	75 Instansi/Lembaga	8.450.375.000,00	8.450.375.000,00	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Smd
		4 03 08 01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1	2	8.061.650.000,00	3	6.561.650.000,00	4	6.561.650.000,00	5	6.561.650.000,00	5	6.561.650.000,00	5	8.450.375.001,00	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian		
		4 03 08 02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	60 Unit	147 Unit	3.950.991.000,00	172 Unit	2.450.991.000,00	192 Unit	2.450.991.000,00	207 Unit	2.450.991.000,00	217 Unit	2.450.991.000,00	217 Unit	8.450.375.002,00	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Smd	
		4 03 08	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	110 Unit	120 Unit	4.110.659.000,00	126 Unit	4.110.659.000,00	130 Unit	4.110.659.000,00	140 Unit	4.110.659.000,00	150 Unit	4.110.659.000,00	150 Unit	8.450.375.003,00	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Smd	



## BAB VII KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	TARGET					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sakip		77,49	77.50	78,00	78,50	79.00	80,00	80,00



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dapat tercapai.

Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 bersifat dinamis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen dari setiap unit kerja BAPPEDA Prov. Kaltim sangat diharapkan, dengan demikian BAPPEDA Prov. Kaltim sesuai tugas dan fungsinya untuk dapat mengedepankan aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi antara BAPPEDA Prov. Kaltim dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 yang disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan



fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2019-2023 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran tahunan BAPPEDA Prov. Kaltim.



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda - 75123

☎ (0541) 741044 – Sentral  
☎ (0541) 742283 – Faksimili

☎ 743085 – Kepala  
☎ 743086 – R. Rapat Kepala  
☎ 736212 – Sekretaris

☎ 745381 – Bid. Ekonomi  
☎ 745382 – Bid. Pemerintahan & Sosial Budaya  
☎ 737551 – Bid. Prasarana Wilayah

☎ 745351 – Bid. Perencanaan & Pengendalian  
Pembangunan Daerah  
☎ 745380 – UPTB. Pusat Data & Informasi

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 188.4 / 910 / B.Um-Bapp / 2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, & Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berkenaan dengan berakhirnya periode pelaksanaan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018, maka akan disusun Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa Rencana Strategis Bappeda Prov.Kaltim sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja Bappeda Prov.Kaltim dalam mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
- d. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2017;  
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Menghimpun data/bahan, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.
3. Melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tim kepada Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sistematisa penyusunan Renstra Bappeda Prov. Kaltim penanggung jawab adalah :

BAB I Pendahuluan : Bidang Sekretariat

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim : Bidang Sekretariat

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Prov. Kaltim : Seluruh Bidang

BAB IV Tujuan dan Sasaran : Seluruh Bidang

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan : Eselon III dan Eselon IV

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan : Seluruh Bidang

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan : Seluruh Bidang

BAB VIII Penutup : Bidang Sekretariat

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun wajib berpedoman pada peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan melalui DPA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Juni 2018

**Kepala,**



**Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si**  
NIP. 19590714 198611 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Kaltim di- Samarinda
2. Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah Setda Provinsi Kaltim di- Samarinda.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda.
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim di- Samarinda
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR :188.4 / 910 /B.UM-BAPP/2018 TENTANG SUSUNAN  
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN  
2019 - 2023**

---

- I. Penanggung Jawab / Ketua Tim : Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- II. Sekretaris Tim : Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- III. Tim Penyusun Renstra Bappeda Prov. Kaltim :  
1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Kaltim  
2. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Prov. Kaltim  
3. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim  
4. Kepala Bidang SDMP Bappeda Prov. Kaltim  
5. Seluruh Kasubbid, Kasubbag dan Kasie Bappeda Prov. Kaltim
- IV. Tim Sekretariat Penyusun Renstra Bappeda Prov. Kaltim : Bidang Sekretariat :  
1. Tutik Priyantini, S.P  
2. Sajid Ikhsan Fuad, S.T.  
3. Hendro Prowodadi  
4. Slamet Hariyanto, A.Md.  
5. Muhammad Hendra Wahyudi  
6. Muhammad Agus Hendra
- Bidang P3D :  
1. Novan Edwin, S.E.  
2. Said Aboe Hanifah, S.Sos.  
3. Ika Wahyuni, S.E.  
4. Dany Fachriza, S.T.  
5. Della Ariani Putri, S.STP.  
6. Asfiandi Zulfiar, S.T.
- Bidang Prasarana Wilayah :  
1. Stella Felicia Sinaga, S.Si.  
2. Siti Rachmah Wulandari, S.T.  
3. Perdana Jati Leksono, ST, M. Eng.
- Bidang Ekonomi :  
1. Nurmiana Afriany, S.T.  
2. Irwan Lesmana Saputra, S.Hut, M.P.  
3. Ariana, S. Sos., M.Si.  
4. Marinda Asih Ramadhaniah, S.Si, M.Ec.M.Ec.Dev  
5. Rieka Indah Budiana, S.Sos.  
6. Idham Rahma Putra, S.T.  
7. Zainul Husin, A.Md.

Bidang SDMP :

1. Djarot Kurniadi, S.P.
2. Ismawardi, S.E.
3. Suwindra Yudha Pratama, S.STP, M.Si.
4. Astien Ariyani, S.E.
5. Sukandar, S.Sos.

Bidang UPTB :

Slamet Rohidi, S.E.

- V. Bagian Unsur Sekretariat Surat Menyurat, Operator dan Menghimpun Data,  
Bahan Penyusunan Renstra Bappeda Prov. Kaltim

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : Juni 2018

**Kepala,**



**Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si**

NIP. 19590714 198611 1 001

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Renstra Perangkat Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Agenda Kerja		√		
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Provinsi	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah Provinsi	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Provinsi		√		
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			

19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang telah disyahkan	√			

Kepala Bappeda  
Provinsi Kalimantan Timur



Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si  
NIP. 19590714 198611 1 001

Samarinda, 26 April 2019  
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur  
Kepala Bidang SDMP



Dr. H. Harvi Surtoso  
NIP. 19630710 198811 1 005



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044 <http://bappeda.kaltimprov.go.id>,  
e-mail : [mail@bappedakaltim.com](mailto:mail@bappedakaltim.com)